

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan International*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar Agus Salim, 2009. *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*. USU Press, Medan.
- Bambang Sunggono, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- C. Djisman Samosir, 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dwija Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Elwi Danil dan Nelwitis, 2015. *Hukum Penintensier*. Universitas Andalas, Padang.
- Elwi Danil, 2012. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Evi Hartatanti, 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. PT. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rusli Muhammad, 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafinda, Jakarta.
- Suteki, Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers, Depok.
- Titik Triwulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana, Jakarta.
- Widyo Pramono, 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP* Seri 3. ELSM, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Novita, 2019. “Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No. 1.

Sri Wulandari, 2017. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Remisi Bagi Narapidana”. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 14. No. 1.

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015. “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”. *Jurnal Perspektif*. Vol. 22. No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 yang sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021.

D. Internet

Anonim, Wikipedia, "Punishment", (<https://en.wikipedia.org/wiki/Punishment>, diakses 22 Maret 2022 pukul 17.00 WIB).

Handar Subhandi, 2019. Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. (<http://handarsubhandi.blogspot.com/2019/11/pengelompokan-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses 24 Maret 2022 pukul 04.50 WIB).

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2019. *Obral Remisi Untuk Tipikor*. (<https://antikorupsi.org/id/article/obral-remisi-untuk-koruptor>, diakses pada tanggal 25 November 2022, Pada pukul 23:11 WIB).

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022. *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. (<https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>, diakses 24 April 2022 pukul 01.00 WIB).

